

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, dan Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1:2 (2021): 247
- Ali, Muhammad. "Kisah Khalifah Umar Membakar Pintu Istana Gubernur Kufah yang Tertutup", <https://www.liputan6.com/islami/read/4243445/kisah-khalifah-umar-membakar-pintu-istana-gubernur-kufah-yang-tertutup> (Diakses pada 6 Oktober 2024)
- Amir, Faisal. "Analisis Yuridis Pemakzulan Bupati Jember Dalam Putusan Nomor 2.P KHS/2020." *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Anwar, Syamsul, dkk. *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.
- Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. *Pejabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media 2019.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Article II section 4 United State Constitution, <https://constitution.congress.gov/browse/article-2/> (diakses pada 6 Oktober 2024)
- Azhari, Abdul Kholiqn, dan Abul Haris Suryo Negoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Impeachment Kepala Daerah Dalam Mendorong Upaya Good Governance." *An-nadhliyah: jurnal studi keislaman* 1:1 (2022): 33.
- Bergas, Kukuh. "Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49:4 (Desember 2019): 852.
- Campbell, Henry. *Black's Dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Group, 1991.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (selanjutnya disebut Adami Chazawi I)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- D, Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, diterjemahkan oleh P. A. F Lamintang. Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- DPRD Lumajang, "Fungsi, Tugas, dan Hak DPRD, <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ftw>, (Diakses pada 1 Agustus 2024)
- DPRD Kabupaten Tegal, "Hak dan Kewajiban", <https://dprd-tegalkab.go.id/hak-dan-kewajiban/>, (diakses pada 1 Agustus 2024)
- Fakihudin, Rifki. "Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law", *Jurnal Scientia Indonesia* 7:1 (April 2021): 10.
- Fazeri, Achmad. "Khalifah Umar bin Khattab Tidak Segan Pecat Gubernur Jika Ada Protes Dari Rakyat", <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2014/12/17/35281/khalifah-umar-bin-khattab-tidak-segan-pecat-gubernur-jika-ada-protes-dari-rakyat.html> (Diakses pada 6 Oktober 2024)
- Fera, Rahma Desya. "Ketentuan Fiqh Siyasah Terhadap Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Gusmansyah, Wery. "Pemberhentian Kepala Daerah Karena tindak pidana Korupsi Menurut Undang-undang Hukum Islam". *Al-Imarah* 3:1 (2018): 36.
- Gustina, Dewi Candra. "Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah". *Tesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.
- Hakim, Abdul Aziz. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana fan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2010.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Khikmah, Lailatul, dan Agus Purwanto. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Di Pulau Jawa)." *Diponegoro Journal of Accounting* 12:1 (2023): 2.
- Kontesa, Mesi. "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022.
- Kristianto, Jusuf, dkk. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Mahdi, M Fakhru. "Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Ma'ruf, Umar. *Politik Hukum Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah*. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian 1*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mokodompit, Agrian Novaldi. "Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Pasca Reformasi di Tinjau Dari UU No 22/1999, UU No. 32/2004, & UU No.23/2014." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Murtadho," Kemendagri Resmi Berhentikan Ade Yasin Sebagai Bupati Bogor, <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1762503/kemendagri-resmi-berhentikan-ade-yasin-sebagai-bupati-bogor> (Diakses pada 31 Juli 2024)

- MPR RI. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- MPR RI. *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- Nugroho, Dhimas Agta. "Tinjauan Yuridis Pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
- Nurjamil, Faisal Faturrahman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Usulan Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Ahkam* 2:2 (2023): 316-317
- Partamayasa, Yoga. "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah." *Jurnal Yustika* 2:1 (Juli 2020): 53.
- Partamayasa, Yoga. "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah", *Jurnal Yustika* 23:1 (Juli 2020):56
- PBNU, "*Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU*". Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, "Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah> (diakses pada 5 Oktober 2024).
- Pratiwi, A., & Arifin, R. Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5:2 (2019):144-163.
- Prayitno, "Tasdi Resmi Diberhentikan Sebagai Bupati Purbalingga", <https://www.rmoljawatengah.id/tasdi-resmi-diberhentikan-sebagai-bupati-purbalingga> (Diakses pada 3 Agustus 2024)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.
- Putra, M.M.Q Alfian R. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Rahman, Abdul. "Impeachment Dalam Uud 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-a-Vis Proses Politik." *Jurnal Hukum Diktum* 14:1 (Juli 2016): 92.

- Rahmi, Nabitha Zaki'ah. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa)." *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, 2020.
- Rama, Hironimus. "DPRD Kabupaten Bogor Berhentikan Bupati Bogor Ade Yasin, PPP Absen, Ini Kata Iwan Setiawan",  
<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2023/08/22/dprd-kabupaten-bogor-berhentikan-bupati-bogor-ade-yasin-ppp-absen-ini-kata-iwan-setiawan>  
 (Diakses pada 31 Juli 2024)
- Rauf, Wahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Rauf, Wahyunir, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sachedina, Abdulaziz A. *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, Badung: Mizan, 1991.
- Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Singgih. *Duniapun Memerangi Korupsi*. Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis Universitas Pelita harapan, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Timika, "DPRD Usulkan Johannes Rettob Menjadi Bupati Mimika Definitif,"  
<https://koranpapua.id/2024/06/11/dprd-usulkan-johannes-rettob-menjadi-bupati-mimika-definitif/>. (diakses pada 31 Juli 2024).
- Wahyuni Desi, "Implikasi Dakwaan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Keberlangsungan Kekuasaan Presiden Indonesia Abdurahman Wahid Dan Presiden Amerika Serikat William Jefferson Clinton". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Yahya, Ismail. *Hubungan Rakyat dan Penguasa Perspektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Yusa, I Gede. dkk, *Hukum Tata Negara*. Malang : Setara Press, 2016.

Zulhidayat, Muhammad. "Perbandingan Konstitusional : Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia". *Jurnal Hukum Replik* 7:1 (2019): 8.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

